



► PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sewa Aset Daerah Kini Bisa Menggunakan QRIS



Ilustrasi, warga melakukan pembayaran nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bank Indonesia menyebutkan transaksi pembayaran QRIS tumbuh hingga mencapai 217,33% dalam setahun terakhir dengan jumlah pengguna mencapai 52,55 juta.

Transaksi sewa aset daerah di Kota Jogja saat ini bisa menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pemkot Jogja menginisiasi QRIS Sewa Aset sebagai upaya mendorong percepatan implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Rr. Andarini, menjelaskan di Kota Jogja sewa aset daerah dapat diekstensifikasi dalam mengoptimalkan pendapatan bagi daerah. Sewa aset daerah,

seperti penggunaan gedung, tanah dan fasilitas milik pemerintah dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang signifikan.

"Digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan hanya soal mempermudah pembayaran, namun juga soal transparansi dan akuntabilitas.



Melalui QRIS Sewa Aset, harapannya proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu dapat disederhanakan menjadi lebih praktis dan efisien sehingga memudahkan masyarakat," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital, catatan transaksi dapat tercatat secara lebih baik, meminimalisir potensi kesalahan maupun kebocoran, dan memungkinkan pemerintah untuk melakukan monitoring secara *realtime*.

Andarini menyatakan dengan menggunakan QRIS Sewa Aset, masyarakat dapat memanfaatkan aset-aset milik daerah dengan melakukan pembayaran secara cepat dan aman melalui ponsel. Sistem ini dapat diakses mulai 1 Oktober 2024 untuk kategori lapangan dan gedung olahraga (Gor).

Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, mengapresiasi BPKAD Kota Jogja yang terus memberikan inovasi untuk memberikan pelayanan efektif dan efisien bagi masyarakat. Dengan berbagai inovasi ini realisasi pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan melampaui target.

"Realisasi PAD Kota Jogja pada 2023 sebesar Rp803 miliar, atau tercapai lebih 115,59 persen dari target realisasi yang ditentukan. Selanjutnya, kami memiliki tantangan memaksimalkan potensi PAD yang ada, karena tahun ini target PAD sebesar Rp1 triliun," katanya. (Lupus Subarkah*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005